**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sektor pertanian terus saja terpuruk, sehingga nasib petani tak kunjung sejahtera. Saat ini sekitar 60% kemiskinan terjadi di Indonesia berada pada pedesaan dan lebih dari 70% kemiskinan di pedesaan itu terkait dengan pertanian.[[1]](#footnote-2) Kemiskinan di sektor pertanian bersumber pada kemiskinan dari para pelaku utama sektor ini, yakni para petani. Maka Restra Kementerian Pertanian 2010-2014 dengan visi pembangunan pertanian sampai tahun 2025 adalah: “Terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani”.[[2]](#footnote-3)

Karena itu, pemerintah melalui berbagai kebijakannya menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan diwujudkan dalam bentuk subsidi pupuk.[[3]](#footnote-4) Subsidi pupuk ditujukan untuk meningkatkan daya beli petani terhadap pupuk demi meningkatkan produksi.

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang secara historis menjadi tulang punggung kebijakan subsidi bidang pertanian di Indonesia. Sejak program Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas) dilaksanakan pada tahun 1969, pada Desember 1949 pemerintah menggabungkan Rencana Kasimo dan Rencana Wisaksono menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa, yang salah satu komponen yang diterapkan adalah penambahan hara kimiawi ke dalam tanah atau disebut pemupukan.[[4]](#footnote-5)

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi (pengecer) yang ditunjuk oleh distributor. Sasaran pengguna pupuk bersubsidi adalah petani yang mengusakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani.[[5]](#footnote-6) Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk usaha taninya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2015, produksi padi nasional mencapai lebih dari 70 juta ton, dan produktivitas mencapai 5,1 ton padi per hektar.[[6]](#footnote-7) Peningkatan Produksi padi tiap-tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

###### Tabel 1. . Indikator Kinerja Utama Kementan 2015-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Satuan | Baseline 2014 | Baseline 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | (%/thn) |
| Peningkatan produksi padi | | | | | | | | |
| Produksi Padi | Juta ton | 70,84 | 74,99 | 76,22 | 78,13 | 80,08 | 82,08 | 3,00 |
| *Sumber*: Kementan 2019[[7]](#footnote-8) | | | | | | | | |

Tidak dapat dimungkiri bahwa kebijakan subsidi pupuk memberikan andil besar terhadap tingginya produktivitas padi di Indonesia. Kabupaten Langkat merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Sumatera Utara. Kabupaten Langkat memiliki lahan sawah seluas 37.054 hektare, dengan jumlah produksi mencapai 224.947 ton. Sedangkan Kecamatan Secanggang merupakan kecamatan dengan produksi padi sawah terbesar di Kabupaten Langkat sebesar 84.324 ton pada luas panen 13.098 hektar dengan produktivitas 64, 38 Kw/Ha tahun 2019.[[8]](#footnote-9)

Studi mengenai kebijakan subsidi pupuk ini penting dilakukan karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertanian sebagai sumber pencaharian bagi mayoritas penduduknya. Di sisi lain, kebijakan subsidi pupuk juga dinilai tidak efektif dalam hal biaya, pencapaian target petanian, kurang tepat waktu dan harga, bahkan cenderung mendorong penggunaan pupuk yang berlebihan.[[9]](#footnote-10)

Ketika hara tanah ini menipis atau bahkan habis, tanaman tidak tumbuh sempurna atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Maka manusia modern berusaha menggantikan hara tersebut dengan pupuk-pupuk kimia hasil industri. Kandungan phosphor yang berlebihan dari penggunaan pupuk kimia menyebabkan tanah-tanah mengeras karena phosphor tidak larut dalam air. Demikian pula dengan kandungan nitrogen yang berlebihan dalam pupuk kimia justru membuat tanah kehilangan kesuburannya dalam jangka panjang.[[10]](#footnote-11) Barangkali inilah salah satu bentuk kerusakan nyata jaman ini di darat akibat ulah tangan-tangan manusia yang disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*.” (QS Ar-Rum 30 :41).[[11]](#footnote-12)

Nah, sekarang kita tentu ingin kembali ke jalan yang benar termasuk dalam urusan penggunaan pupuk dalam bertani ini. Agar kita tidak merusak tanah dan kesuburannya, agar bumi ini terus bisa mencukupi kebutuhan makanan untuk kita dan anak cucu serta ternak-ternak kita yang ujungnya juga untuk kita. Maka kebijakan penyediaan pupuk wajib memenuhi prinsip empat tepat, yaitu: tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat jenis.[[12]](#footnote-13)

Aspek efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan subsidi pupuk sudah menjadi perhatian setiap pemerintah di negeri ini, termasuk pemerintah Kabinet Kerja. Berbagai instansi pemerintah sudah melaksanakan kajian tentang hal ini, seperti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (2010), Bappenas (2011), dan Badan Pemeriksa Keuangan (2013). Ketiga laporan tersebut menengarai adanya ketidakefektivan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian subsidi pupuk.[[13]](#footnote-14)

Isu kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mahal masih tetap menjadi berita di setiap awal musim tanam. Isu ini sudah berlangsung lama seperti dilaporkan oleh Kariyasa et al.[[14]](#footnote-15) Pada saat ini keluhan yang sering dilontarkan petani di antaranya adalah kelangkaan pupuk, pelaksanaan produksi dan distribusi pupuk tidak efisien, pupuk tidak sampai kepada sasaran penerima secara tepat sasaran, dan terjadi dualisme pasar yang dapat menciptakan *moral hazard.*

Berdasarkan hasil observasi terdapat salah satu warga yang menjalankan usaha tani padi, Wagiman mengatakan kelangkaan pupuk subsidi ini kerap terjadi, salah satunya di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, terutama di setiap awal musim tanam terpaksa petani harus membeli pupuk non subsidi di pengecer, setelah terjadi paceklik pada musim tahun lalu dikarenakan masalah kelangkaan pupuk, wagiman berharap dengan membeli pupuk non subsidi ini mampu menutupi kerugian musim tahun lalu. Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal sehingga menurunkan hasil panen petani atau bahkan terjadi gagal panen. Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman terhadap ketahahanan pangan dan lebih jauh lagi akan menurunkan tingkat pendapatan petani.[[15]](#footnote-16)

Masalah yang dihadapi petani selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi pasar yang belum berpihak kepada petani yang tersirat dalam ideologi pangan murah di Indonesia, dimana petani menjadi korban karena harga jual yang belum menguntungkan. Sementara, petani yang miskin harus ikhlas untuk lebih miskin, dengan harga murah yang diterimanya agar harga pangan terjangkau dan tetangga yang daya belinya terbatas tetap bisa makan.

Kondisi kemiskinan sektor pertanian dengan segala persoalannya tersebut, menjadi sebuah ironi apabila dikaitkan dengan serangkaian kebijakan yang telah ditempuh untuk menanganinya. Seharusnya, berbagai persoalan tersebut mampu ditangani dengan kebijakan yang diterapkan, namun persoalan tersebut masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi.

Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus diantaranya kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga *actual* melebihi HET, dan marjin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran, kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET.

Dengan mempertimbangkan isu kebijakan subsidi pupuk yang masih diperdebatkan dengan nilai subsidi sudah mencapai belasan triliun rupiah per tahun, maka untuk mengetahui dan mengungkapkan lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan apa yang terjadi sebenarnya sehingga persoalan pupuk bersubsidi masih muncul hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul penelitian **Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan di atas maka dapat diambil batasan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan subsidi pupuk diterapkan pada lini IV di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana kebijakan subsidi pupuk pada tingkat petani atau kelompok tani di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana penggunaan pupuk bersubsidi pada masyarakat petani padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan subsidi pupuk diterapkan pada lini IV di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ?
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan subsidi pupuk pada tingkat petani atau kelompok tani di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
3. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan pupuk bersubsidi pada masyarakat petani padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + - 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya mengenai implementasi kebijakan subsidi pupuk pada petani padi sawah. Selebihnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan penelitian sejenis dan sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan di sektor pertanian.

* + - 1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sebuah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan petani serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait agar dalam melaksanakan kebijkan subsidi pupuk dapat terwujud dengan benar sesuai dengan Restra Kementerian Pertanian dan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan petani Indoesia terutama di Kecamatan Secanggang.

1. **Penjelasan Istilah**

Agar istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini tidak terjadi salah pengertian dari pokok pembahasan yang diteliti, maka penulis membatasi istilah tersebut sebagai berikut:

* + - 1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan.[[16]](#footnote-17) Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukis kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh ahli-ahli studi kebijakan.

Implementasi dalam kamus umum Bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu: Sebagai pelaksana dari peraturan yang telah ada kedalam tindakan di lapangan oleh para pelaksananya.[[17]](#footnote-18) Implementasi menurut hemat penulis berarti suatu usaha untuk menyesuaikan suatu peraturan yang berlaku atau peraturan yang baru itu sebagai acuan bagi peraturan akan datang.

Efektivitas implementasi dalam pengertian penulis menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, yaitu suatu ukuran pencapaian target yang menunjukkan output realisasi dari yang seharusnya tercapai, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari kebijakan subsidi pupuk adalah bila tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

* + - 1. Kebijakan

*Oxford Learner’s Pocket Dictionary* mendefinisikan kebijakan sebagai suatu perencanaan dari berbagai tindakan yang telah disetujui atau dipilih oleh partai politik, bisnis, dan lain-lain. Atau dapat dikatakan sebagai kontrak asuransi tertulis. Menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto, kebijakan adalah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membuatnya maupun pihak yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).[[18]](#footnote-19) Kebijakan dalam penelitian ini, peneliti adalah ketetapan yang memuat berbagai prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

* + - 1. Subsidi

Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.[[19]](#footnote-20) Subsidi yang dimaksud adalah subsidi pupuk yang digunakan masyarakat petani padi.

* + - 1. Pupuk

Pupuk adalah bahan kimia atau organisame yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk unorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan biologi, dan merupakan hasil industri pabrik pembuatan pupuk, sedangkan pupuk organik di artikan sebagai pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai badan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.[[20]](#footnote-21) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanah. [[21]](#footnote-22)

Pupuk yang peneliti maksud adalah Pupuk yang bersubsidi menurut Keputusan Menteri Pertanian No: 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dan ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat petani. Jenis pupuk bersubsidi yaitu, pupuk (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk Organik. Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005.

* + - 1. Petani

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya ikan.[[22]](#footnote-23) Petani yang peneliti maksud adalah warga yang memiliki usaha tani padi dengan menggunakan pupuk subsidi yang diberikan pemerintah.

* + - 1. Padi

Padi memiliki nama lain *Oryza Sativa.* Bahan makanan ini merupakan jenis makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Semakin lama jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat dan tentu saja kebutuhan pangan akan semakin meningkat juga.[[23]](#footnote-24) Padi dimaksud peneliti adalah padi yang mengalami fase pertumbuhan hingga vegetative dan reproduktif tanaman padi menjadi gabah dan di proses untuk menjadi beras.

Menurut Septiadi beras adalah komoditas pangan utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekitar 98 % penduduk Indoensia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Beras juga merupakan komoditas dengan permintaan yang inelastic, artinya perubahan harga tidak menyebabkan perubahan jumlah permintaan konsumen dan apabila ketersediaan berkurang akan mengakibatkan harga melambung tinggi sehingga tidak terjangkau oleh konsumen. [[24]](#footnote-25)

1. Jangkung Handoyo Mulyo and Sugiyarto, ‘Ketahanan Pangan: Aspek Dan Kinerjanya’, in *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasiona*l, ed. by Bambang Hendro Sunarminto (Yogyakarta: BPFE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM, 2010), halm. 67–108. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kementan RI, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Pertanian Tahun 2015 - 2019, Kementerian Pertanian RI, (Jakarta : Biro Perencanaan, 2014) , halm. 167. [↑](#footnote-ref-3)
3. Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, *Dinamika Kebijakan : Subsidi Pupuk & Ketahanan Pangan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), halm. X. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20160927112742261370982>. [↑](#footnote-ref-4)
4. Achmad Suryana, Adang Agustian, dan Rangga Ditya Yofa, “Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan,” Jurnal *Analisis Kebijakan Pertanian*, . 14 No. 1, Juni 2016. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2018), halm. 35 <https://doi.org/10.21082/akp.v14n1.2016.35-54>. [↑](#footnote-ref-5)
5. Hafsah dan Sudaryanto, “Usaha Tani dan Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi : Studi Kasus di Persawahan DAS Brantas.,” in Ekonomi Padi dan Beras Indonesia, ed. oleh Fagi AM Kasryno F, Pasandaran E (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2004), halm. 225–252. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, Dinamika…, halm. X. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kementan RI, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Pertanian Tahun 2015 - 2019, Kementerian Pertanian RI, 2014., halm. 171. [↑](#footnote-ref-8)
8. Badan Pusat Statistik Kabupaten Langka diakses melalui situs <http://langkatkab.bps.go.id> pada tanggal 30 September 2019. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wayan Susila, “Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali,” Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 5, No.1 (2010), halm. 43–44. Dikutip dalam Iwan Hermawan, “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No.1, Juni 2014, halm. 65 . [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhaimin Iqbal, “Pertanian Dalam Al-Qur’an (Bagian II)” <http://www.geraidinar.com> [diakses 30 September 2019]. [↑](#footnote-ref-11)
11. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Rilis Grafika, 2009). [↑](#footnote-ref-12)
12. “Konsideran dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.” [↑](#footnote-ref-13)
13. Suryana, Agustian, dan Yofa,dkk *“Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan*” Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 14 No. 1, Juni 2016 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, halm 35. [↑](#footnote-ref-14)
14. Irma Kurnia Adiningsih, “Pengaruh Kebijakan Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Indonesia. Tesis” (Program Studi Magister Studi Kebijakan, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2017) <http://etd.repository.ugm.ac.id/.>., halm. 12. [↑](#footnote-ref-15)
15. Wagiman, ketua Kelompok Tani padi Sri Sumberjo Kecamatan Secanggang, Wawancara di Dusun Pasar Gunung, Kelurahan Hinai Kiri Kabupaten Langkat, Pada Senin, 26 September 2019. [↑](#footnote-ref-16)
16. Zainal Said. Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), halm. 29. [↑](#footnote-ref-17)
17. Abdul Wahab, Solikin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), halm. 23. [↑](#footnote-ref-18)
18. Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran* (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan, 1997), halm. 34. [↑](#footnote-ref-19)
19. Jeremi Sihombing, Sri Fajar Ayu, dan Hasman Hasyim, “Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi :Desa Pancar Arga, Asahan,” *Jurnal Pertanian Studi Agribisnis Universitas Sumatera Utara*, halm. 4.. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Pasal 1 peraturan Mentri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2018*. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sihombing, Ayu, dan Hasyim. *Analisis…*, halm.4. [↑](#footnote-ref-22)
22. Keputusan Menteri Pertanian R.I No. 04/Kpts/RC.210/B/2019 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2019.halm. 4. [↑](#footnote-ref-23)
23. Windi Eka Pratiwi, “Pengaruh Pemberian Boron Terhadap Pertumbuhan Tiga Varietas Tanaman Padi (Oryza sativa)”Skripsi. (Online). (Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, 2019) <http://digilib.unila.ac.id> pada 21 Oktober 2019.. halm. 10. [↑](#footnote-ref-24)
24. Septiadi, “Dampak Kebijakan Perberasan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Tesis,” (Institut Pertanian Bogor, 2015)., halm. 13 [↑](#footnote-ref-25)